



Peta Inarisk Kawasan Longsor

Udrekh

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana

Gambaran Umum

- **InaRISK (web)** adalah **portal** hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik (Rp.), potensi kerugian ekonomi (Rp.) dan potensi kerusakan lingkungan (ha) dan terintegrasi dengan berbagai data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.
- **InaRISK Personal (Apps)** adalah sebuah **tools/aplikasi** berbasis smartphone untuk memberikan informasi ancaman bencana disuatu lokasi berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilengkapi dengan edukasi untuk upaya antisipasinya.



**Telah ditambahkan berbagai Fitur lain
untuk mendukung upaya Penanggulangan Bencana**



- InaRISK: Sistem informasi Risiko Bencana.
- InaRISK: berisikan Peta Risiko Bencana.
- InaRISK: berbentuk **WEB** dan **Aplikasi HP**.

Berbasis WEB
&
SmartPhone



<https://inarisk.bnppb.go.id>



@inaRISK

inaRISK
inarisk.bnppb.go.id
KETAHUI RISIKO DAERAH ANDA!

InaRisk merupakan sebuah sistem informasi online berbasis GIS services yang dapat menampilkan kajian risiko bencana (bahaya, kapasitas, kerentanan, dan risiko) dan monitoring penurunan indeks risiko bencana diseluruh indonesia. Dalam pemanfaatannya, InaRisk dapat berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan daerah dan memproyeksikan kerugian akibat bencana.



INARISK PERSONAL (MOBILE APPS)

KETAHUI ANCAMAN DITEMPAT ANDA
IKUTI PETUNJUK REKOMENDASI
LINDUNGI DIRI DAN KELUARGA
DARI ANCAMAN BENCANA!

DOWNLOAD

1. Scan the QR Code
2. <http://inarisk.bnppb.go.id/apps/inarisk.apk>



© BNPB, 2017

- Ditujukan untuk Pemerintah, perencana, akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat
- informasi hasil kajian risiko bencana berupa ancaman bencana, kerentanan (populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan), kapasitas, dan risiko bencana.



Identifikasi sebaran risiko bencana yang dikaitkan dengan kepentingan lain

Dilengkapi dengan *Dashboard* untuk berbagai kebutuhan, termasuk **Pemantauan** beberapa aktivitas **pengurangan risiko bencana**

inaRISK Personal

how risky is your place?

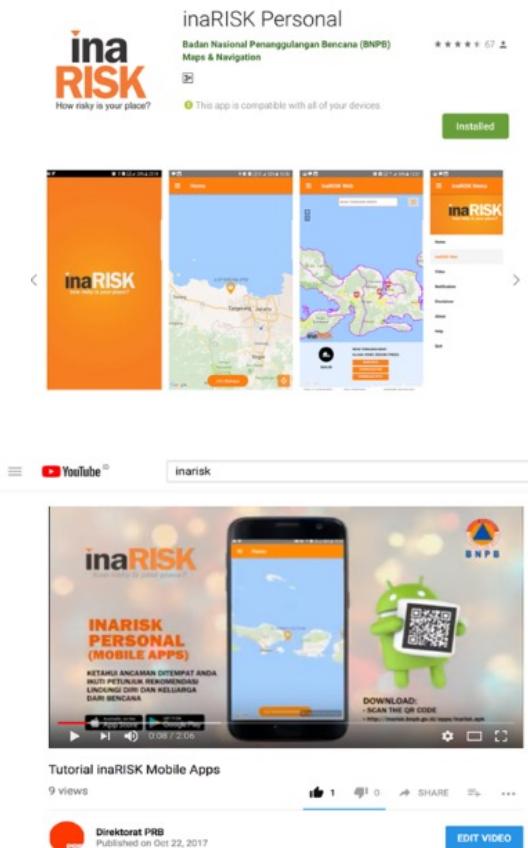
- Ditujukan untuk masyarakat
- Identifikasi tingkat bahaya berdasarkan lokasi (koordinat)
- Rekomendasi aksi antisipasi untuk individu



Identifikasi tingkat Bahaya
Untuk setiap titik di Indonesia



Dilengkapi dengan *Fitur* untuk
berbagai kebutuhan, termasuk
**PELAPORAN KEGIATAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA**



MENGAPA KAJIAN RISIKO?

- UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana: Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - Pasal 36 (3):
 - Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
 - Pasal 6:
 - (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
 - (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana
 - Pasal 8
 - (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana
 - (7) Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan

KEBUTUHAN KAJIAN RISIKO

- Untuk formulasi RPB (Nasional/Provinsi/Kabupaten)
- Untuk formulasi RAN-PRB (dan RAD-PRB)
- Untuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
- Untuk Rencana Kontijensi
- Rencana Operasi Darurat
- Rencana Pemulihan
- Rencana Kesiapsiagaan Masyarakat

Gambaran Umum Tanah Longsor di Indonesia Berdasarkan Inarisk

Bahaya

- Luas bahaya sedang – tinggi: 79.521.265 Ha



Kerentanan

- Luas kerentanan sedang : 824.785 Ha
- Luas kerentanan tinggi : 922.240 Ha



Kapasitas

- Kapasitas tinggi : 28 kabupaten/kota
 - Kapasitas sedang : 210 kabupaten/kota
 - Kapasitas rendah : 226 kabupaten/kota



Risiko

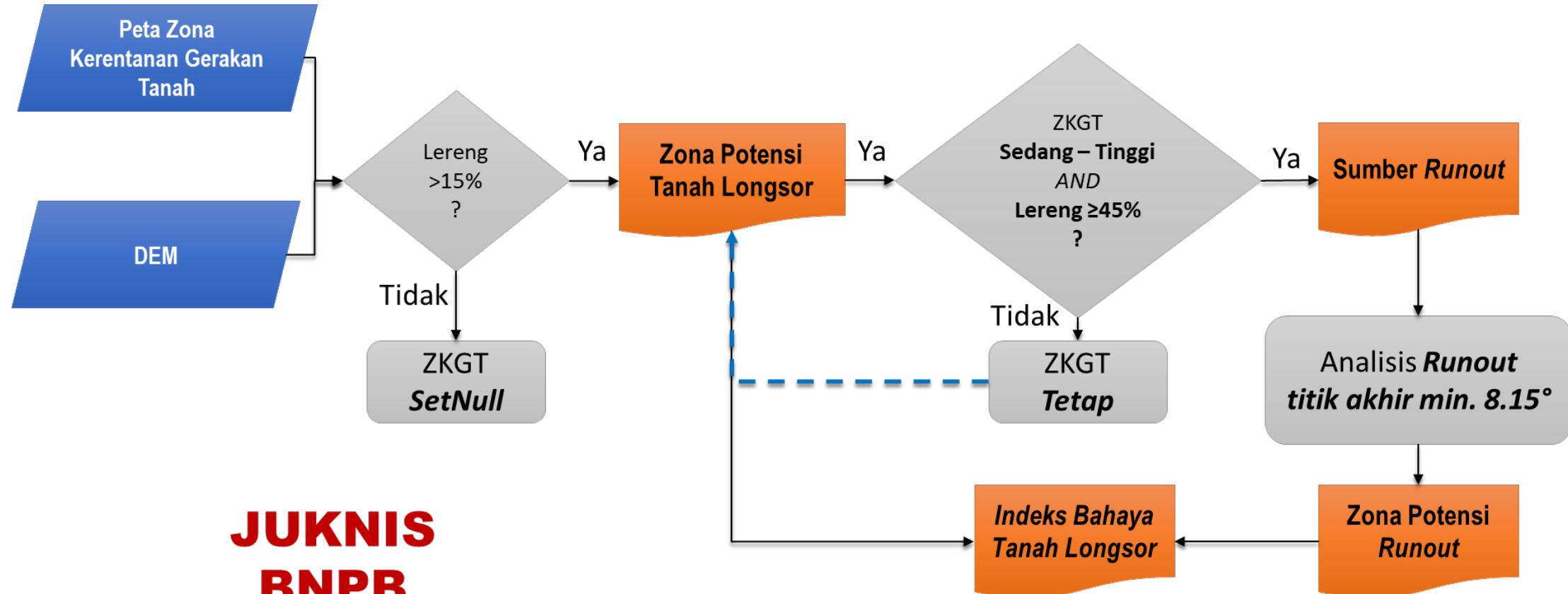
- Luas risiko: 79.521.265 Ha
- Jiwa terpapar: 20.736.093 jiwa
- Fisik (Rp Miliar): 180.831.930
- Ekonomi (Rp Miliar): 515.194.074
- Lingkungan: 7.685.637 Ha



METODE PENYUSUNAN



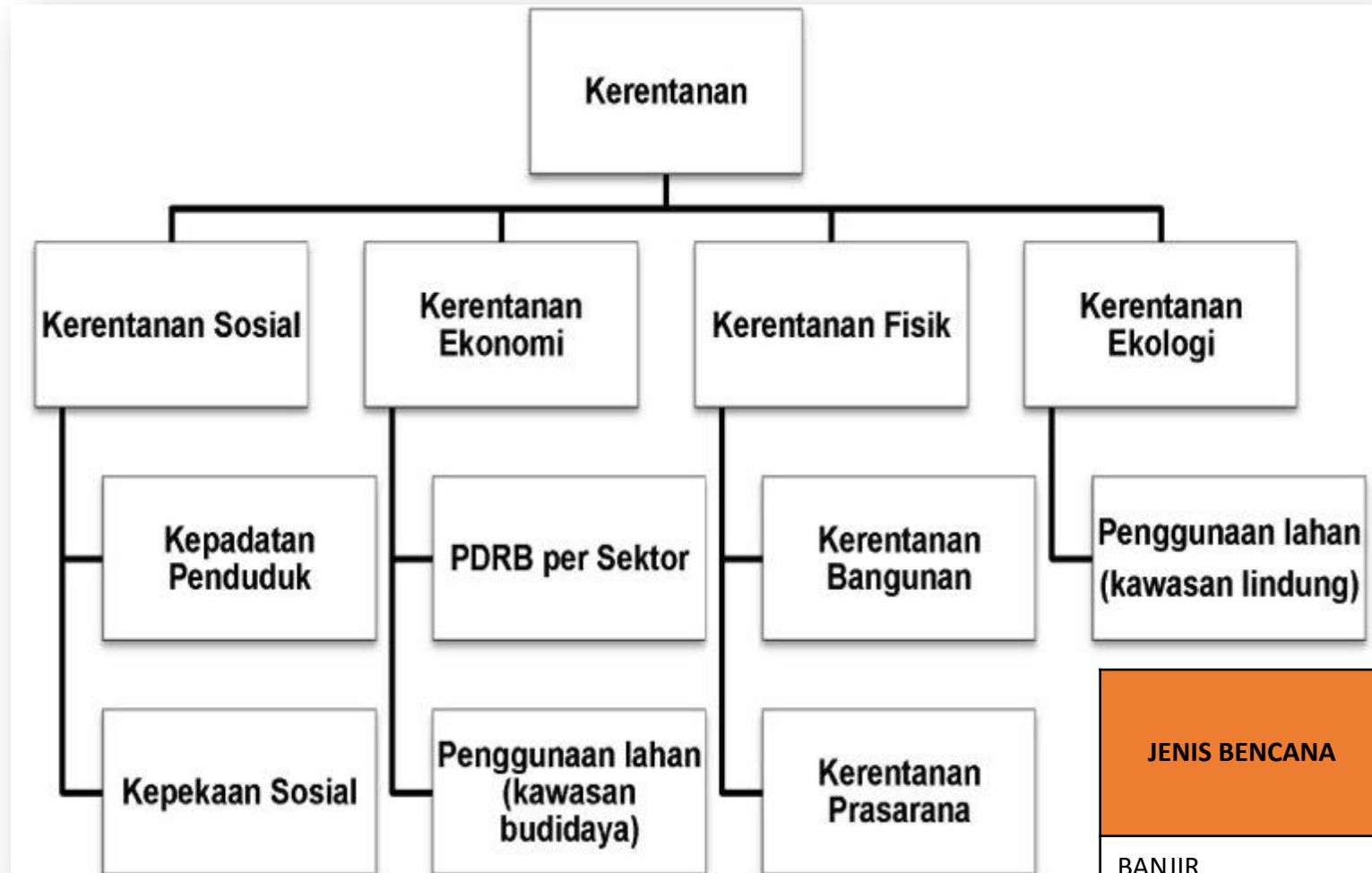
METODE BAHAYA Tanah Longsor



**JUKNIS
BNPB**

SUMBER: DIT. PERB BNPB

KOMPONEN INDEKS KERENTANAN



JENIS BENCANA	BOBOT PARAMETER KERENTANAN (PENENTUAN INDEKS KERENTANAN)			
	SOSIAL	FISIK	EKONOMI	LINGKUNGAN
BANJIR	50%	35%	10%	5%
TANAH LONGSOR	50%	35%	10%	5%
BANJIR BANDANG	50%	35%	10%	5%

METODE KAPASITAS

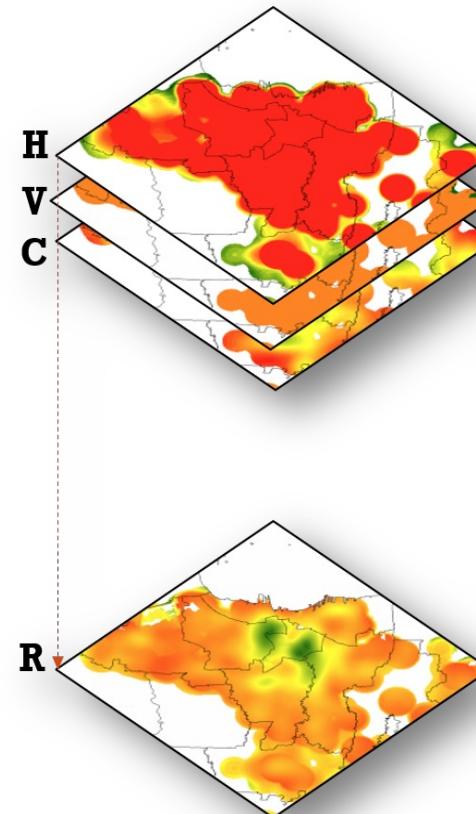
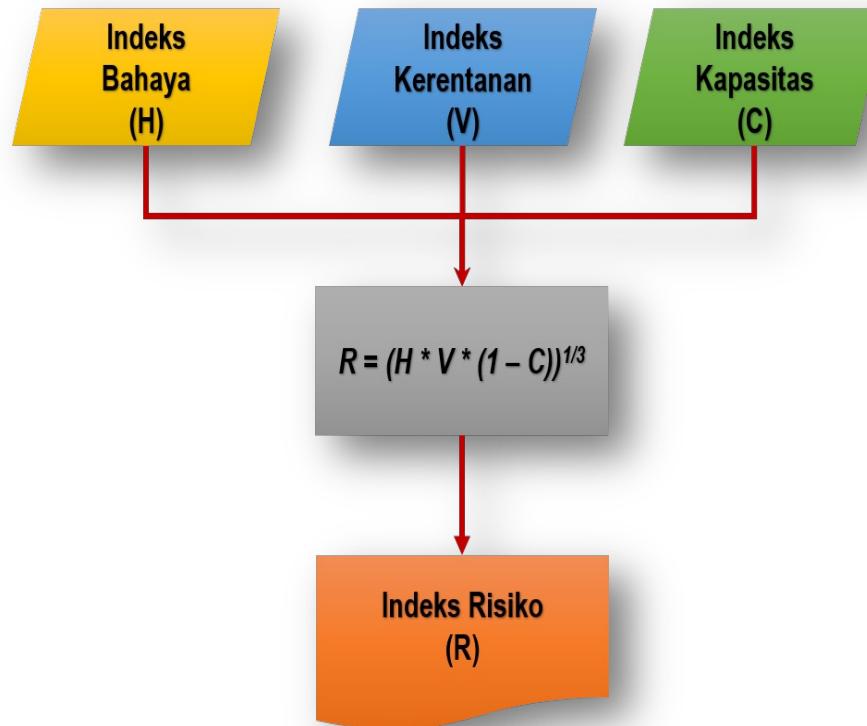
Parameter	Bobot (%)	Kelas		
		Rendah (0-0.333)	Sedang (0.334-0.666)	Tinggi (0.667-1)
Ketahanan Daerah	40	Transformasi nilai 0 - 0.40	Transformasi nilai 0.41 - 0.80	Transformasi nilai 0.81 - 1
Kesiapsiagaan Masyarakat	60	<0.333	0.334-0.666	0.667-1

Jika $IKD \leq 0.4$, $IKDT = 1/3 \cdot 0.4 \cdot IKD$

Jika $0.4 < IKD \leq 0.8$, $IKDT = 1/3 + (1/3 \cdot 0.4 \cdot (IKD - 0.4))$

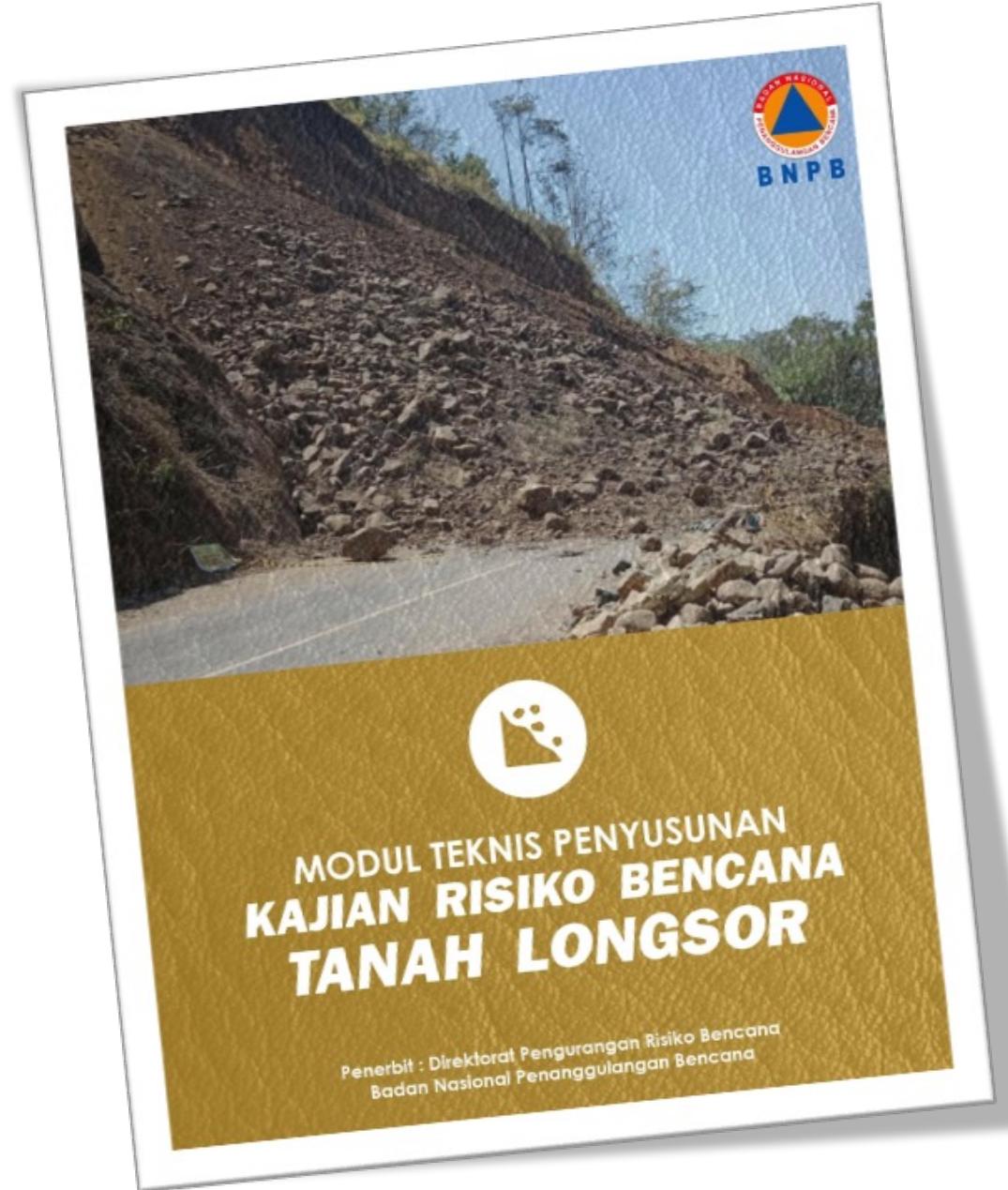
Jika $0.8 < IKD \leq 1$, $IKDT = 2/3 + (1/3 \cdot 0.2 \cdot (IKD - 0.8))$

METODE RISIKO



- $R = (H \times V \times (1 - C))^{1/3}$

JUKNIS KRB Tanah Longsor



[Tautan](#)

Contoh Penanganan Berbasi DAS

KOMITMEN BERSAMA STAKEHOLDER TERKAIT PADA RENAKSI 2020-2024

Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Jabodetabek

Kamis, 2 Januari 2020 03:24 WIB

BAGIKAN   



RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR DI KAWASAN JABODETABEK PUNJUH 2020-2024

LAMPIRAN KOMITMEN BERSAMA PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
REKAPITULASI RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR 2020 - 2024

NO.	STRATEGI	QUICK WINS	JUMLAH KEGIATAN	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB	BIAYA INDIKATIF
III PENANGANAN HILIR						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Regulasi dan Kebijaksanaan	51	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Depok	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Kota Tangerang Selatan	448.362.183.192
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan	8	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat	1.651.973.144.174
		Pengurangan Bahaya	28	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan	3.997.419.150.776
3	Mengendalikan dan Melindungi	Pembangunan Infrastruktur**	129	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang	15.239.649.674.983
		Pengendalian Penurunan Tanah	5	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Kementerian PUPR, Provinsi DKI Jakarta	565.893.336.713
4	Meningkatkan Kesiapsiagaan	Pengiatan Manajemen Krisis	22	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan	209.792.536.080
		Peringatan Dini Banjir	6	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten	BNPB, Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan	16.442.245.150
SUBTOTAL KEGIATAN			249	SUBTOTAL BIAYA INDIKATIF		22.129.532.271.066

TOTAL KEGIATAN

*) Kegiatan dan pagu anggaran masih bersifat indikatif.

3) Pemerintah Desa/agar menertibkan daerah sempadan sungai/pengadaan tanah/pembatasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir.

Surabaya, 02 Juni 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah

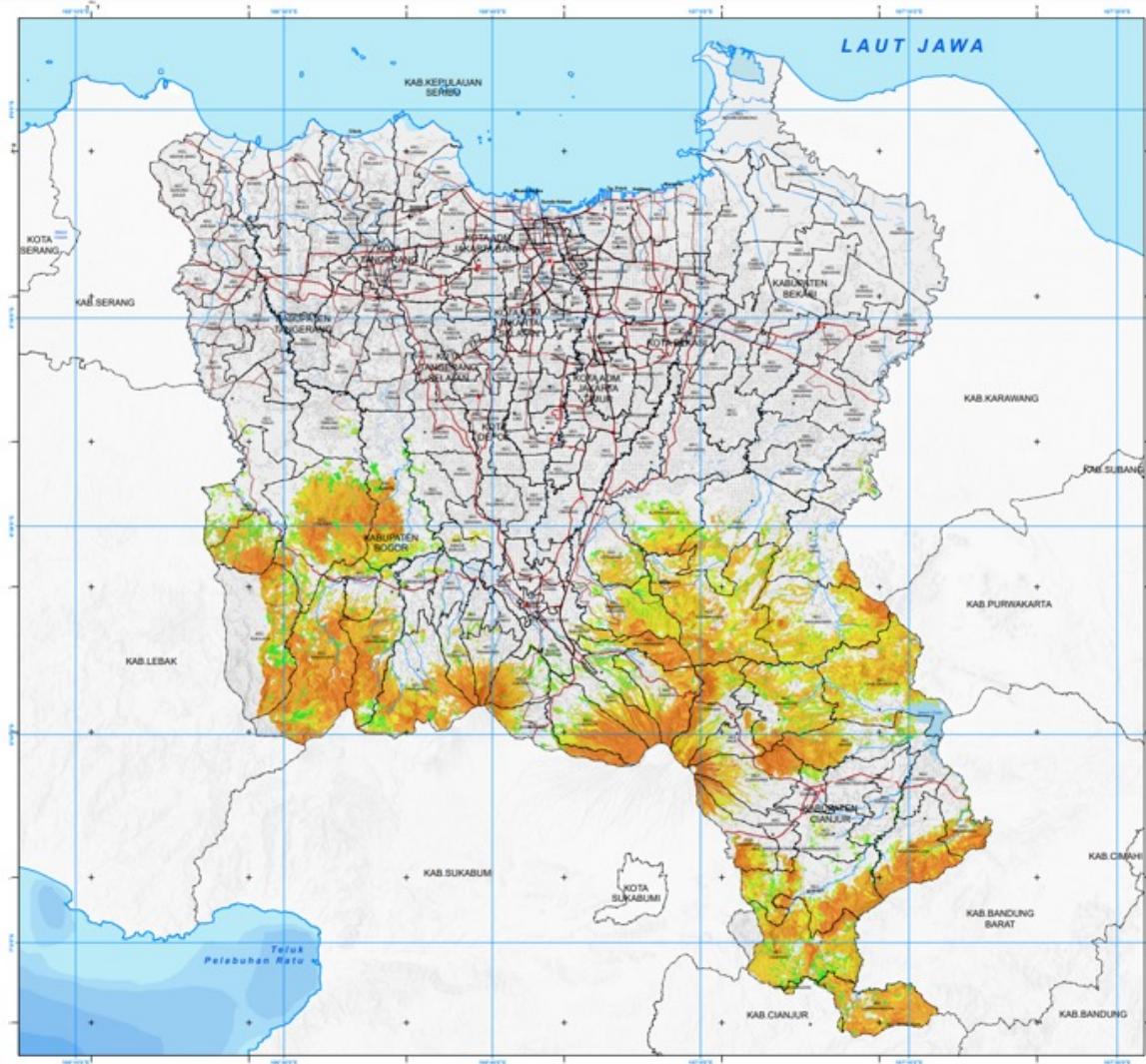
MENTERI DALAM NEGERI	MENTERI PPN KEPALA BAPPENAS	MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA			
UHAMMAD TITO KARNAVIAN	(SUHARSO MONAARFA)	(M. BASUKI HADIMULJONO)	(SOFYAN A. DUALIL)	(SITI NURBAYA)	(DONI MONARDO)			
	GUBERNUR JAWA BARAT	GUBERNUR DKI JAKARTA	GUBERNUR BANTEN					
	(MOCHAMAD RIDWAN KAMIL)	(ANIES BASWEDAN)	(WAHIDIN HALIM)					
WALIKOTA BOGOR	WALIKOTA TANGERANG	WALIKOTA BEKASI	WALIKOTA CIANJUR	WALIKOTA BOGOR	WALIKOTA BEKASI	WALIKOTA TANGERANG SELATAN	WALIKOTA TANGERANG	WALIKOTA DEPOK
ADE YASIN	(A. ZAKI ISKANDAR)	(EKA SUPRIA ATMAJA)	(H. HERMAN SUHERMAN)	(BIMA ARYA)	(RHAMAT EFFENDI)	(ARIN RACHMI DIANY)	(H. ARIEF R. WISMANSYAH)	(KH. MOH. IDRIS)

Bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E sehingga tidak diperlukan tamatan dengan tanda tangan dengan stempel basah.



Kajian dan Pemetaan dan Analisa Risiko menjadi salah satu komitmen dan aksi BNPB. BNPB telah menyusun pada T.A 2021.

PETA RISIKO LONGSOR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR



**PETA RISIKO
TANAH LONGSOR
KAWASAN JABODETABEKPUNJUR**



SUMBER DATA

Informasi Geospasial Dasar:
- Peta Ruangpublik Indonesia Skala 1:50.000 (BKG, 2016)

Informasi Geospasial Tematik:
- Peta Sistem Lahan/Ruang Skala 1:50.000 (BKG, 2016)

Informasi Geospasial Tematik:
- Peta Sistem Lahan/Ruang Skala 1:50.000 (BKG, 2016)

Gambar Latar: Variante DEM Nasional 9.0 met (BKG, SRTM 10 Plus, NCGA)

Kota, Pelabuhan, dan Bandara
Provinsi Banten, BRI, 2019

Waduk dan Zonasi Waduk Berpotensi
Dok. melalui dan koefisien parameter dasar dituliskan di Perka No.2/2012
Motor Teknis Kapan Raskin

Batasan:
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW/kawasan JABODETABEKPUNJUR. Penggunaan batas administrasi dan nama pengaruh, tidak dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi batas administrasi dan nama pengaruh. Peta ini tidak digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RTRW/kawasan JABODETABEKPUNJUR. Peta dapat diolah dengan jatah pada ukuran terbatas.

BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Binaan Nasional
Dinas Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Tabel 3.99. Perbandingan Bahaya Tanah Longsor Eksisting dengan Proyeksi

KABUPATEN/KOTA	EKSTISITING			PROYEKSI		
	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	Kelas	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	Kelas
Bekasi	353.25	5	Tinggi	367.02	6	Tinggi
Bogor	129,282.39	317	Tinggi	129,652.20	342	Tinggi
Cianjur	72,477.81	160	Tinggi	72,506.70	163	Tinggi
Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-
Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-
Kota Bekasi	-	-	-	22.14	2	Tinggi
Kota Bogor	345.15	13	Tinggi	407.79	21	Tinggi
Kota Depok	-	-	-	21.42	2	Tinggi
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
Tangerang	-	-	-	31.14	3	-
JABODETABEKPUNJUR	202,458.60	495	Tinggi	203,008.41	539	Tinggi

Tabel 3.100. Perbandingan Bahaya Tanah Longsor Eksisting dengan Proyeksi Berdasarkan DAS

DAS/SUB DAS	EKSTISITING			PROYEKSI		
	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	KELAS	Total Luas Bahaya (Ha)	Total Desa Terkena Bahaya	KELAS
CIDURIAN	19,187.19	43	Tinggi	19,271.43	46	Tinggi
CILELEUS	-	-	-	-	-	-
CILIWUNG	10,544.40	41	Tinggi	10,601.37	50	Tinggi
CIMANCEURI	5,672.07	16	Tinggi	5,811.93	24	Tinggi
CIPASILIAN	-	-	-	-	-	-
CIRARAB	-	-	-	-	-	-
CISADANE	53,608.95	158	Tinggi	53,704.44	167	Tinggi
CITARUM	96,920.01	188	Tinggi	96,948.90	191	Tinggi
K. ANGKE PESANGGRAHAN	-	-	-	0.27	1	Rendah
K. BEKASI	16,521.12	34	Tinggi	16,665.21	45	Tinggi
K. BUARAN	-	-	-	-	-	-
K. CAKUNG	-	-	-	-	-	-
K. KRUKUT	-	-	-	-	-	-
K. SUNTER	-	-	-	-	-	-
Sub Das Lainnya	4.86	15	Tinggi	4.86	15	Tinggi
JABODETABEKPUNJUR	202,458.60	495	Tinggi	203,008.41	539	Tinggi

Sumber : Hasil pengolahan pengkajian risiko , 2021

TERIMA KASIH

“innovative approaches including trans-boundary governance that not only consider ecosystem-based approach but also oriented on socio-culture and welfare aspects of community at risks. This is followed by building Indonesia's political will to adopt systemic risk governance framework by considering suitability and needs of government authorities and community at risk.”



B N P B

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

GRAHA BNPB - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur



+6221 - 2982 7793



+6221 - 2128 1200



contact@bnpb.go.id



Ppid@bnpb.go.id



www.bnpb.go.id



+62812 - 955 900 90



BNPB Indonesia



@BNPB_Indonesia



BNPB Indonesia



BNPB Indonesia



Infobencana BNPB



@Infobnpb



bnpbindonesia.tv



+62812 - 123 75 75